

## Proyek Gedung DPRD Tak Kunjung Rampung Kontraktor Dapat Perpanjangan 50 Hari



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 11/01/2025

**BALIKPAPAN** - Wakil rakyat di legislatif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan. Salah satunya membahas pembangunan Gedung DPRD Balikpapan yang tak kunjung rampung.

Seharusnya proyek ini memiliki tenggat waktu pada Desember. Kenyataannya hingga kini belum selesai. Kabid Gedung Pemerintahan Dinas PU, Dewi Indamawaty mengatakan progres pembangunan gedung sudah 99 persen.

Kontraktor mendapat perpanjangan waktu pekerjaan selama 50 hari untuk merampungkan proyek tersebut. "Akibat keterlambatan ini kontraktor wajib membayar denda sebesar 1/1.000 persen dari nilai kontrak," katanya.

Adapun tahap kedua lanjutan pembangunan Kantor DPRD Balikpapan memiliki nilai proyek Rp36,8 miliar dari APBD 2024. Kontraktor pemenang PT Unggul Sokaja yang beralamat kantor di Jakarta Timur.

Bahkan pembangunan gedung kantor ini turut dalam pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. "Sejak awal diawasi KPK sebagai langkah mitigasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran," katanya kepada awak media.

Harapannya dengan ada pengawasan KPK memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan serta menghindari potensi korupsi. "Transparansi dalam setiap tahapan pembangunan gedung ini," imbuhnya.

Tak hanya selesai pada tahap ini, pembangunan Gedung DPRD Balikpapan akan berlanjut ke tahap ketiga. Pihaknya menunggu proses identifikasi terhadap pekerjaan yang belum selesai pada tahap kedua.

"Kami *review* dulu memastikan apa saja yang belum dikerjakan. Hasil identifikasi akan menjadi bagian dari pembangunan tahap ketiga," sebutnya. Dalam dokumen lelang ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan kontraktor.

Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan tahap kedua ini meliputi pekerjaan gedung C arsitektur dan interior, pekerjaan gedung B pada lantai 2 arsitektur dan *roof top*.

Lalu pekerjaan gedung A pondasi, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, *roof top*, dan lainnya. Proyek pembangunan yang tak rampung ini sudah kerap dikeluhkan oleh Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri.

Wakil rakyat menyoroti pekerjaan yang terkesan lamban. Padahal keberadaan kantor ini penting untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah seperti sementara rapat paripurna harus digelar di aula Gedung Parkir Klandasan. (ms)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Proyek Gedung DPRD Tak Kunjung Rampung, Kontraktor Dapat Perpanjangan 50 Hari, 11/01/25
2. Kaltimpost.com, Proyek Kantor DPRD Balikpapan Tak Kunjung Rampung, Ada Perpanjangan 50 Hari, 10/01/25

**Catatan:**

Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.